

LK i P



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Pattimura No. 2 Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKJIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKJIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Pekanbaru, 11 Februari 2022

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



HERMAN, SE.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199503 1 014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah berhasil dicapai. Dari dua Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian indikator angka produksi daging ruminansia lokal dikategorikan sangat tinggi dengan capaian kinerja 102,59% dan capaian indikator persenstase status kesehatan hewan termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan persenstase 98,05%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. ke depan. Tantangan tersebut antara lain :

- Usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia	5
1.4. Sarana dan Prasarana	7
1.5. Fungsi dan Tugas	8
1.6. Aspek Strategis Organisasi	11
1.6. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi	12
1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Perjanjian Kinerja	22
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021.....	26
2.4. Instrumen Pendukung	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 . Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	30
3.2. Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV. PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran Tindak Lanjut	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (orang).....	6
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 (orang).....	6
Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 (orang)	7
Tabel 1.6. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	8
Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau	14
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	18
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024	18
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024	20
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau	23
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021.....	31
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2019 Dan 2020.....	32
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra.....	33

Tabel 3.5. Produksi Daging Ruminansia (dari ternak lokal dan dari luar daerah)	35
Tabel 3.6. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi	37
Tabel 3.7. Pelayanan Kesehatan Hewan	42
Tabel 3.8. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran	46
Tabel 3.9. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 3.10. Program Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1	48
Tabel 3.11. Program/Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Status Kesehatan Hewan (sasaran strategis ke-2)	50
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021	53
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2021	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi.....	4
Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.	5
Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Gambar 1.4. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (orang)	6
Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai pada masing-masing Bidang/UPT	6
Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional tertentu.....	7
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI	25
Gambar 2.2. Tampilan aplikasi ISIKHNAS di Telepon Genggam pada Petugas Lapangan	27
Gambar 2.3. Tampilan Isikhnas di layar komputer	28
Gambar 3.1. Grafik Produksi Daging Ruminansia Lokal	32
Gambar 3.2. Grafik Produksi Daging Ruminansia.....	35
Gambar 3.4. Grafik Vaksinasi Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2018-2021	43
Gambar 3.5. Penyerahan bantuan alat pengolah pakan ke Kab/Kota	49
Gambar 3.6. Pelayanan Medik di UPT LVKH	52
Gambar 3.7. Pengambilan Sampel Pullorum	52
Gambar 3.8. Pengambilan Sampel PCR AI	53
Gambar 3.9. Pelaksanaan Vaksinasi Rabies Gratis dalam rangka <i>World Rabies Day</i>	53

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi
3. Fungsi dan Tugas
4. SDM Organisasi
5. Sarana Prasarana
6. Aspek Strategis Organisasi
7. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi
8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Riau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan juga Rencana Strategis tahun 2019-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

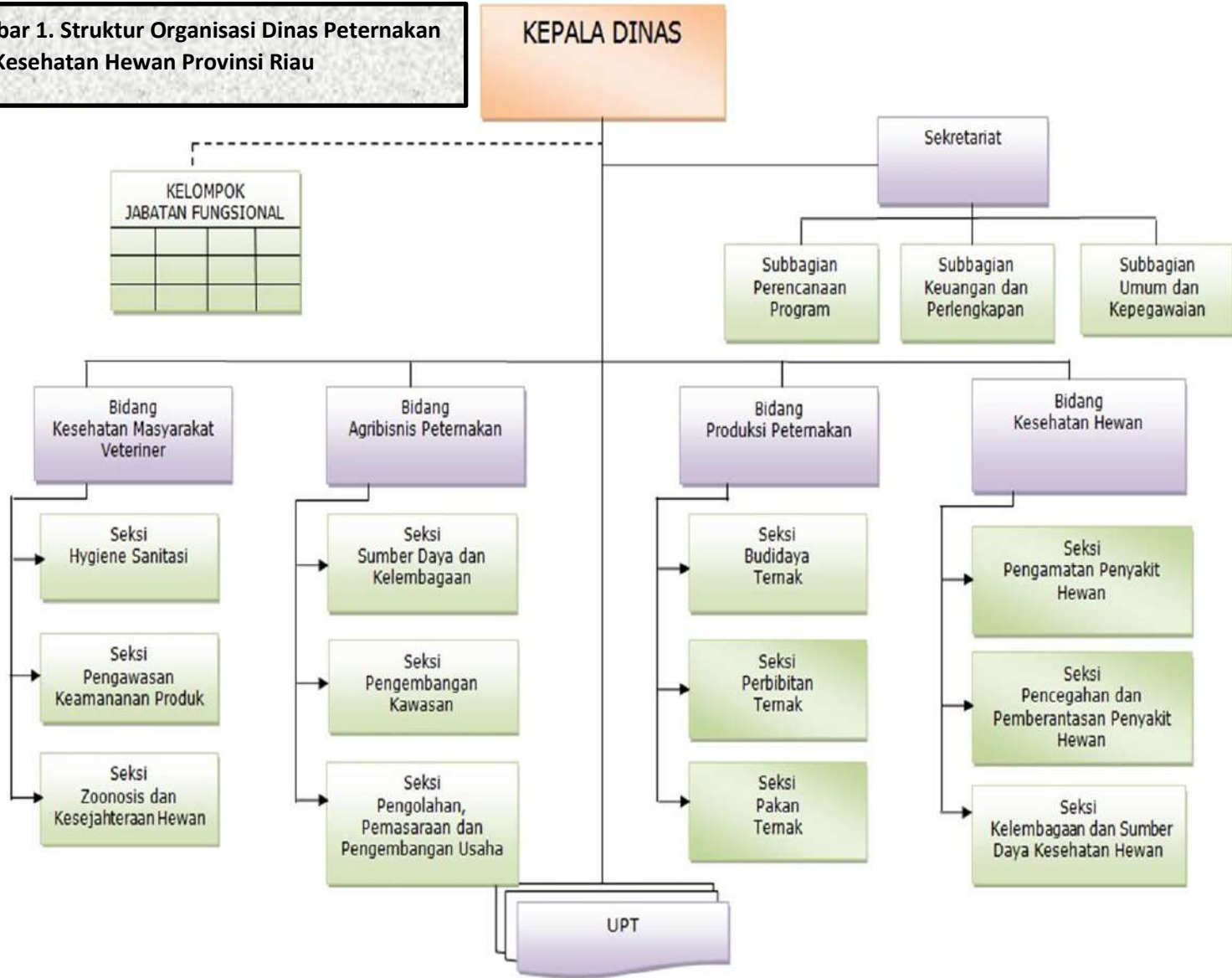
Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti pada Gambar 1. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program; Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Produksi Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Perbibitan Ternak; Seksi Pakan Ternak; serta Seksi Budidaya Ternak.
3. Bidang Agribisnis Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Pengembangan Kawasan; Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan; serta Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
4. Bidang Kesehatan Hewan, yang terdiri atas : Seksi Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; serta Seksi Kalembeagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri atas : Seksi Hygiene Sanitasi; Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
6. UPT Rumah Sakit Hewan, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner.
7. UPT Inseminasi Buatan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
8. UPT Laboratorium Pakan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak
9. Kelompok Pejabat Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

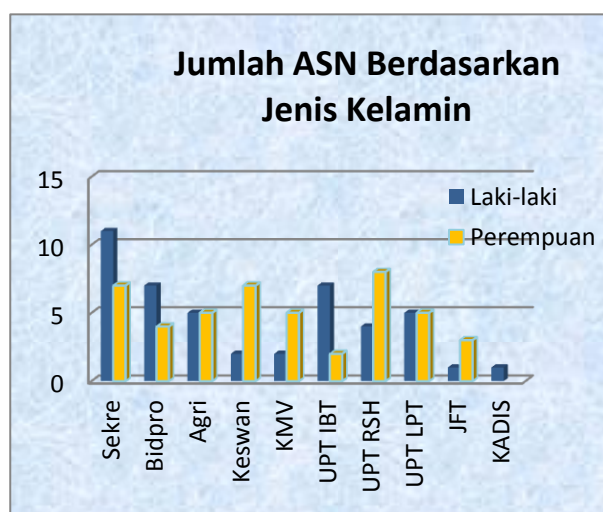


1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2021 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 319 orang yang terdiri dari 91 orang ASN dan 228 orang Non ASN. Rincian ASN terdiri dari 33 orang pejabat struktural, 18 orang pejabat fungsional tertentu, 40 orang pejabat fungsional umum. Sedangkan THL terdiri dari 64 orang di Sekretariat dan Bidang, 87 orang di UPT dan 77 orang pendamping yang terdapat di setiap Kabupaten/Kota. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

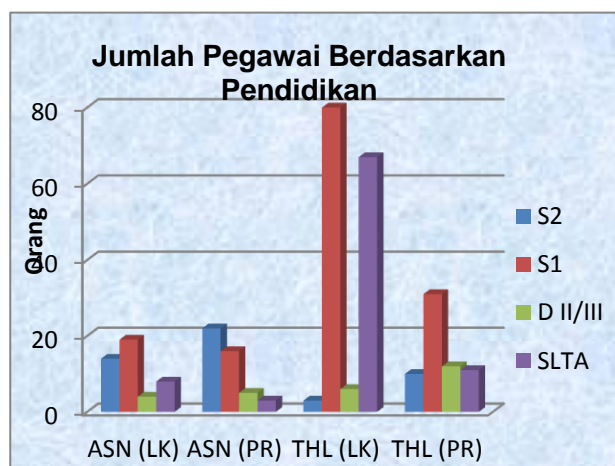
No	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Sekretariat	11	7	18
2	Produksi Peternakan	7	4	11
3	Agribisnis Peternakan	5	5	10
4	Kesehatan Hewan	2	7	9
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	5	7
6	UPT IBT	7	2	9
7	UPT LVKH	4	8	12
8	UPT. PTP	5	5	10
9	Fungsional Madya	1	3	4
10	Kepala Dinas	1	-	1
Total		45	46	91



Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

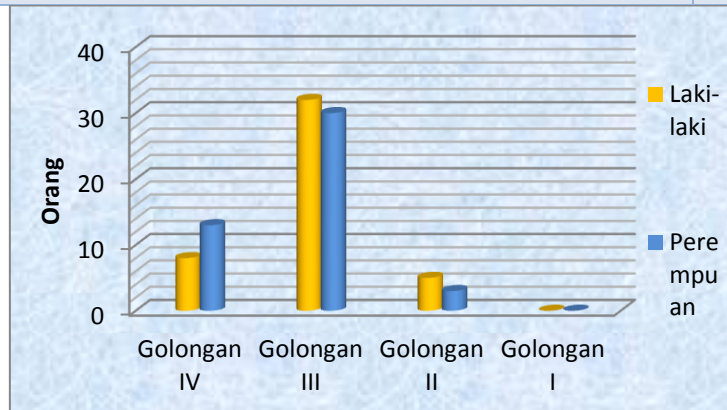
No	Pendidikan	ASN		THL		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	
1	S2	14	22	3	10	49
2	S1	19	16	80	31	146
3	D II/III	4	5	6	12	27
4	SLTA	8	3	67	11	89
5	SLTP	-	-	3	2	5
6	SD	-	-	2	1	3
Total		45	46	161	67	319



Gambar 1.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (Orang)

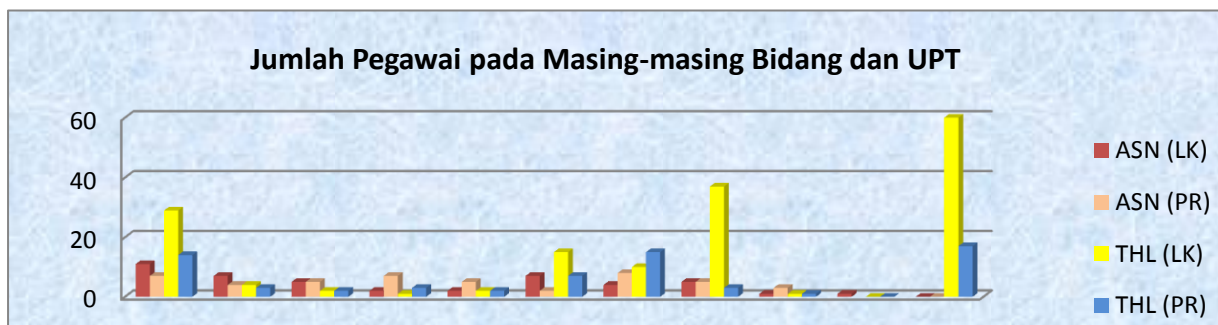
No	Golongan	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
1	Golongan IV	8	13	21
2	Golongan III	32	30	62
3	Golongan II	5	3	8
4	Golongan I	-	-	-
Total				91



Gambar 1.4. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (Orang)

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 (Orang)

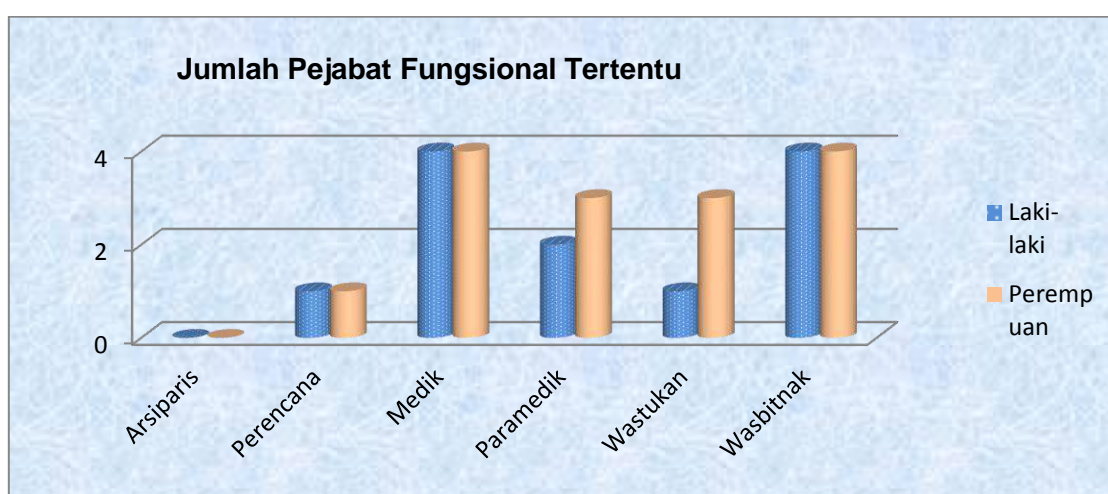
No	Bidang/UPT	ASN		THL		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	
1	Sekretariat	11	7	29	14	61
2	Produksi Peternakan	7	4	4	3	18
3	Agribisnis Peternakan	5	5	2	2	14
4	Kesehatan Hewan	2	7	1	3	13
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	5	2	2	11
6	UPT IBT	7	2	15	7	31
7	UPT LVKH	4	8	10	15	37
8	UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	5	5	37	3	50
9	Fungsional Madya	1	3	1	1	6
10	Kepala Dinas	1		0	0	1
11	Honorar Pendamping Agribisnis	0	0	60	17	77
Total		45	46	161	67	319



Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai pada Bidang dan UPT

Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 (Orang)

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional Arsiparis	0	0	0
2	Fungsional Perencana	1	1	2
3	Fungsional Medik	4	4	8
4	Fungsional Paramedik	2	3	5
5	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	1	3	4
6	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	4	4	8
7	Fungsional Analis	1	1	2
8	Fungsional Penyuluh	1	0	1
Total		14	16	30



Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

1.4. Sarana dan Prasarana

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel.1.6. Data Aset/Modal Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Jelek
1	Gedung kantor	5	4	1
2	Gedung Kantor Lain	1	1	
3	Bangunan Gudang	8	6	2
4	Bangunan Gedung Instalasi	5	5	
5	Gedung Pemotong Hewan Permanen	3	3	
6	Aula	3	3	
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23	12	11
8	Ruang Rapat	2	2	
9	Laboratorium	2	2	
10	Kendaraan Dinas Jabatan roda 4	9	9	
11	Kendaraan Dinas Operasional roda 4	11	6	5
12	Kendaraan Operasional Roda 2	27	27	
13	Kendaraan Roda 3	3		3
14	Holding Ground	1	1	
15	Kandang Sapi	16	13	3
16	Sapi Bull	27	17	10
17	Induk sapi	81	81	
18	Komputer PC	93	84	9
19	Note Book	24	12	12
13	Mesin Fotocopy	3	3	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020

1.5. Fungsi dan Tugas

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Produksi Peternakan

Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Budidaya Ternak, Seksi Perbibitan Ternak, dan Seksi Pakan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Produksi Peternakan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Produksi Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Hewan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Higiene Sanitasi, Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan

Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan, Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Agribisnis Peternakan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Agribisnis Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi ke tiga yakni mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan Pendapatan dengan indikator Nilai PDRB ADHK.

Sub sektor peternakan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, kontribusi sub sektor peternakan yaitu pada penyediaan bahan pangan asal hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging. Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Riau tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Undang-undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tersebut.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan yang ASUH, perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak di Riau sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan terutama kawasan integrasi sapi-sawit dengan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada.

1.7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama beberapa tahun terakhir masih lamban. Produksi daging terutama produksi daging ruminansia masih sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan daging dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Saat ini pemenuhan kebutuhan daging ruminansia terutama sapi masih dominan didatangkan dari luar. Dari total produksi daging ruminansia di Provinsi Riau, produksi daging ruminansia lokal hanya sebesar 24%, selebihnya merupakan daging yang didatangkan dari luar dan dipotong di Provinsi Riau. Dan untuk memenuhi kebutuhan daging ruminansia disamping daging segar juga dipenuhi dari daging beku yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Rendahnya produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau salah satunya dikarenakan jumlah populasi ternak yang masih sedikit. Peningkatan populasi ternak di Riau pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya, Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, penerapan teknologi tepat guna dilapangan masih minim, Good Farming Practice tidak diterapkan dengan baik, dan penataan kelembagaan peternakan belum optimal.

Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi.

Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Produksi Daging Ruminansia Lokal rendah	Jumlah populasi ternak ruminansia sedikit	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
		2	Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah
Pelayanan veteriner belum maksimal			
Minimnya sarana prasarana Puskesmas			
Pengawasan pangan asal ternak yang ASUH belum optimal	Penerapan NKV rendah		
	Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet		
	Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal		

1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai,

keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab I berisi :

1. Rencana Strategis Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Anggaran 2021
4. Instrumen Pendukung

2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang peternakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, serta memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesejahteraan Hewan periode 2014 – 2019, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional maupun regional.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019-2024 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 3 Kepala Daerah yakni pada misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan dinas yakni **Memperkuat Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat

dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal (ton)
		Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase Status kesehatan hewan (%)

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing			
Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing			
Tujuan PD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1.1.Meningkatnya produksi daging	Peningkatan keberhasilan IB	- Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) - Pengembangan produksi semen beku dan cair - Pengembangan sarana dan prasarana IB ternak
		Peningkatan keberhasilan kawin alam	- Penguatan perbibitan ternak
		Peningkatan jumlah dan kualitas bibit ternak	- Pengendalian pemotongan ternak betina produktif

			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan perbibitan masyarakat - Pembinaan ternak ruminansia - Pengembangan agribisnis peternakan - Pembibitan dan perawatan ternak - Pemutakhiran data teknis peternakan dan kesehatan hewan - Pendistribusian ternak
		Pemenuhan kebutuhan pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pakan ternak - Pembangunan sarana dan prasarana Laboratorium Pakan ternak - Pengembangan dan penyediaan pakan ternak
		Peningkatan fasilitasi permodalan kelompok usaha peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses permodalan kelompok usaha peternakan - Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau - Pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan
		Peningkatan agribisnis peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemanfaatan limbah ternak sapi - Pengembangan kawasan peternakan
		Peningkatan penerapan NKV	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan penerapan NKV - Pengawasan peredaran PAH
	1.2.Meningkatnya status kesehatan hewan	Pemantauan penyakit hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Surveilans, pembinaan, monitoring dan evaluasi
		Peningkatan pelayanan veteriner	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sarana dan prasarana UPT
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi

2.1.3. Program Kegiatan

Rencana Program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2019-2024) sudah disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program Utama dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

PROGRAM UTAMA		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak sapi (ekor)
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak (%)

Beberapa pengertian indikator yang perlu diperjelas adalah :

1. Populasi Ternak Sapi adalah jumlah populasi ternak sapi akhir tahun yang telah divalidasi.
2. Angka kematian ternak adalah angka kematian ternak selama tahun 2021 yang diperoleh dari analisis aplikasi ISIKHNAS (Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

Dengan ditetapkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mau tidak mau Dinas Peternakan harus menyesuaikan Program Kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang ada pada Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 sehingga pada DPA tahun 2021 telah menggunakan nomenklatur tersebut.

Program Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada DPA Tahun 2021 sesuai dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Program Bidang Pertanian sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 khusus untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat dalam 4 program yaitu :
 - a) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Penyuluhan Pertanian
- 2) Kegiatan Bidang Pertanian berdasarkan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - b) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - c) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - d) Penataan Prasarana Pertanian
 - e) Penjaminan Kesehatan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - f) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- 3) Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebanyak 1 program dengan 4 kegiatan, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan :
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Riau juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen.

2.2. Perjanjian Kinerja

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun telah ditetapkan perjanjian kinerja namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kondisi pergantian atau mutasi pejabat atau perubahan alokasi, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan. Sehubungan dengan pergantian Pejabat di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan adanya perubahan target kinerja dan pagu anggaran Tahun 2021 maka perjanjian kinerja juga mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal	2.426,2 Ton
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan	95,9%

Pada tahun 2021, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 15 indikator kinerja. Indikator dalam Perjanjian Kinerja tersebut juga mendukung tercapainya IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada sasaran meningkatnya produksi daging ruminansia lokal dan meningkatnya status kesehatan hewan. Perjanjian Kinerja antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp 7.473.898.000,- (Tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (7,5%); II (16,7%); III (29,2%); IV (47,5%); V (62,5%); VI (80%); VII (85,0%); VIII (87,2%); IX (90,0%); X (92,2%); XI (93,2%); dan XII (95,0%),
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran,
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN) sebesar Rp 17.985.000,-

II. Kinerja Tahunan

1. Target Kinerja Populasi dan Produksi

No	Komoditas	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Karkas, Ton)	Produksi Telur (Ton)	Produksi Susu (Ton)
1.	Sapi potong	210.965	8.989		
2.	Sapi perah	104			59
3.	Kerbau	27.017	2.098		
4.	Kambing	236.334	752		
5.	Domba	30.411	30		
6.	Ayam pedaging	97.287.369	107.271		
7.	Ayam petelur	705.806		12.712	
8.	Ayam lokal	7.237.967	3.164	15.100	
9.	Itik	241.664	247	1.830	
10.	Babi	52.048	1.489		

2. Target Kinerja Kegiatan

No	Uraian	Target	Satuan
1	Optimalisasi Reproduksi	30.000	Kelompok Masyarakat
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Laporan
3	Pelayanan Kesehatan Hewan	4	Layanan
4	Layanan Perencanaan	1	Layanan
5	Layanan Perbendaharaan Internal	1	Layanan
6	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Layanan
7	Layanan Humas dan Informasi	1	Layanan
8	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
9	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1	Lembaga
10	Sertifikasi Unit Usaha	3	Lembaga
11	Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	100	Orang
12	Mutu dan Keamanan Pakan	50	Produk
13	Mutu dan Keamanan Produk Hewan	50	Produk
14	Hijauan Pakan Ternak	1	unit
15	Pakan Olahan dan bahan pakan	1	unit

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Tahun 2021

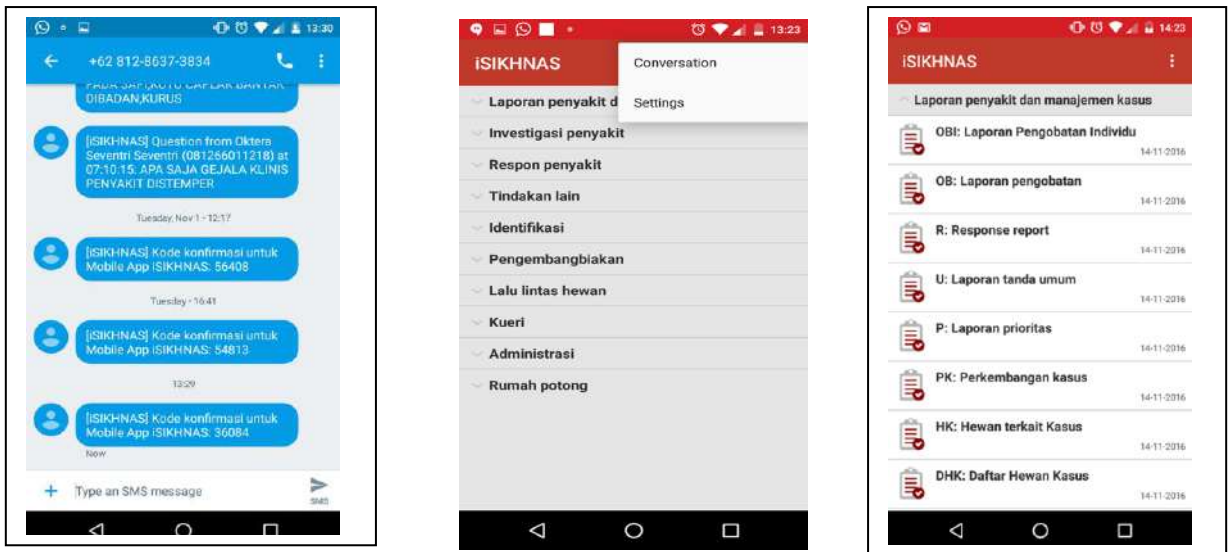
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 64.671.902.133,- melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp.34.854.688.586,-. Sedangkan pelaksanaan anggaran yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.4.510.181.000 ,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.4.490.899.144,-.

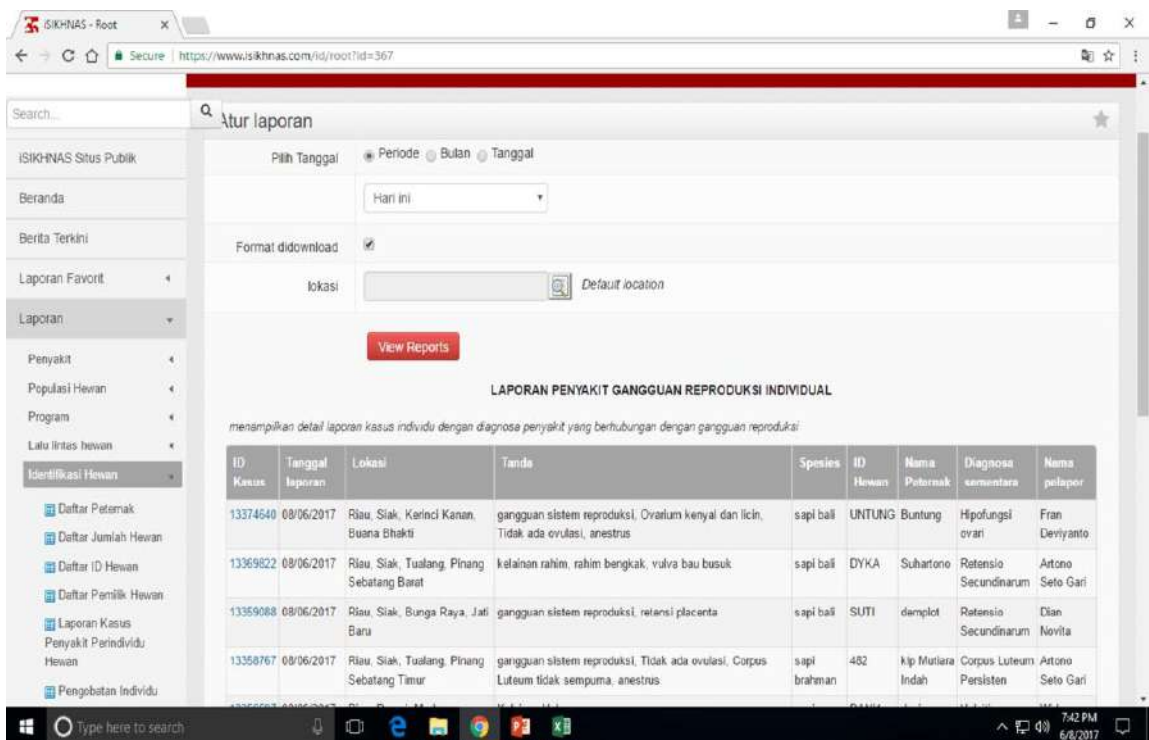
2.4. Instrumen Pendukung

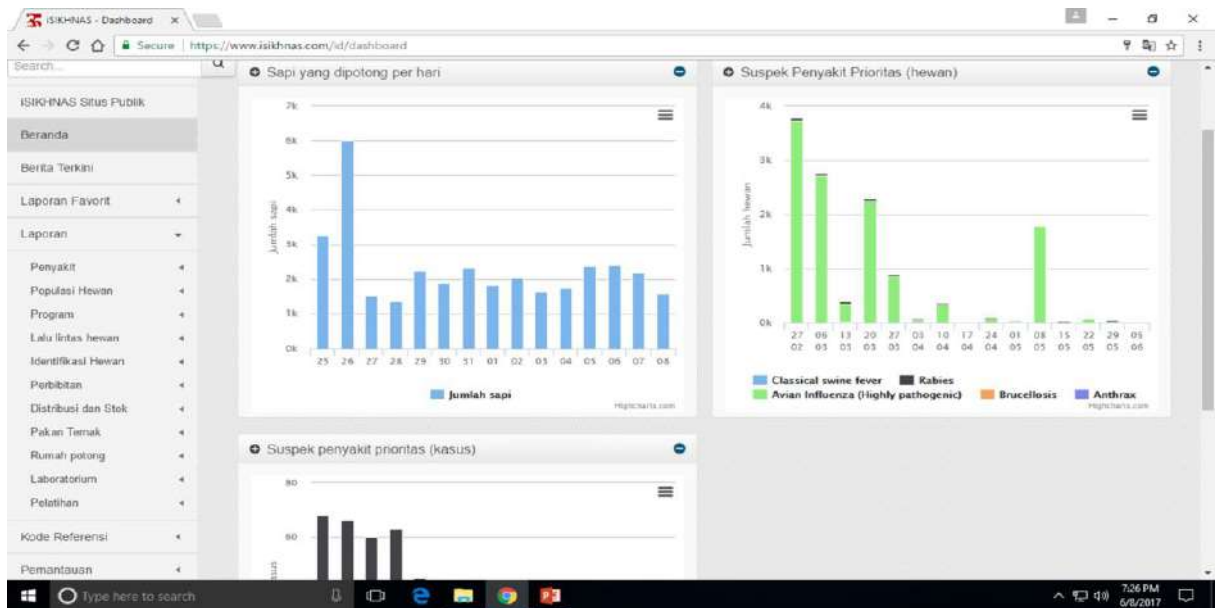
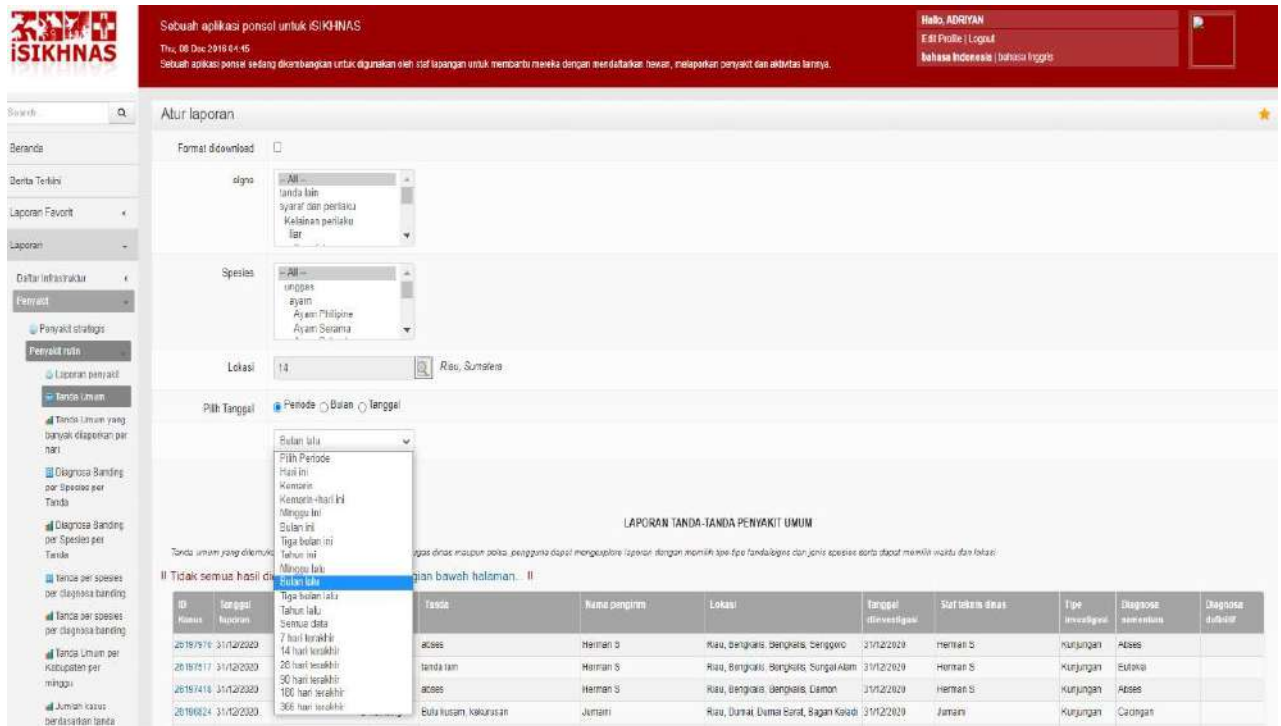
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung beberapa instrumen, yaitu dengan pengembangan aplikasi iSIKHNAS. ISIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari Petugas lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. iSIKHNAS menggunakan pesan SMS dari telepon genggam Petugas Lapangan yang melaporkan sewaktu selesai melakukan pelayanan dalam bentuk pengamatan, pengobatan, pelayanan inseminasi Buatan, Pemeriksaan kebuntingan, pelaporan kelahiran dan lain-lain. Data yang sudah dikirim dari HP Petugas Lapangan masuk ke system aplikasi iSIKHNAS dan membuat data dapat dilihat dan dianalisis dengan cara-cara yang mudah bagi pengguna untuk siapa pun yang memerlukannya. Sistem yang cerdas dan otomatis akan memastikan bahwa data dimasukkan secara akurat, laporan dikirimkan secara otomatis, dan terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang terprogram, dan, yang sangat penting, sistem peringatan bagi staf yang perlu merespon laporan penyakit. iSIKHNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi, guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna. Dengan menggunakan iSIKHNAS, kita akan dapat menghubungkan data laboratorium dengan laporan penyakit, peta dengan data lalu-lintas hewan atau laporan wabah, data rumah potong dengan data produksi dan populasi, dan semua ini dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat membantu

para pengambil kebijakan di berbagai tingkat, juga baik bagi semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan hewan.



Gambar 2.2. Tampilan aplikasi iSIKHNAS di Telepon Genggam pada Petugas Lapangan





Gambar 2.3. Tampilan iSHIKHNAS di layar komputer

Disamping itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memanfaatkan aplikasi pendukung untuk monitoring dan evaluasi berupa Sistem Informasi Pengendalian (<http://monev.riau.go.id>), merupakan sistem aplikasi yang disusun oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau guna mendukung

efektifitas dari proses monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dapat menjadi instrumen pendukung di dalam proses verifikasi dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan.

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewadahi perkembangan informasi tersebut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengelola satu buah website, yaitu : <http://dispkh.riau.go.id>

Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar.

Hadirnya website ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat peternak dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan peternakan. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan ide, masukan atau aduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan peternakan di Riau.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran

3.1. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut :

- (1). Untuk indikator Angka produksi daging ruminansia lokal, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
- (2). Pada indikator jumlah persentase status Kesehatan hewan, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

3.1.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Capain Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal	2.426,2 Ton	2.489 Ton	102,59%	Sangat Tinggi
2	Meingkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan	95,9%	94,10%	98,95%	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 untuk sasaran strategis I : Meningkatnya produksi daging dengan indikator Angka Produksi Daging Ruminansia Lokal menunjukkan bahwa produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2021 adalah sebesar 2.489 Ton dengan capaian

realisasi kinerjanya sudah melebihi target dengan capaian 102,59% kategori Sangat Tinggi.

Pada sasaran strategis II : Meningkatnya status kesehatan hewan dengan indikator persentase status kesehatan hewan, realisasinya 94,10% dengan capaian kinerjanya mencapai 98,84% dengan kategori capaian kinerja Sangat Tinggi.

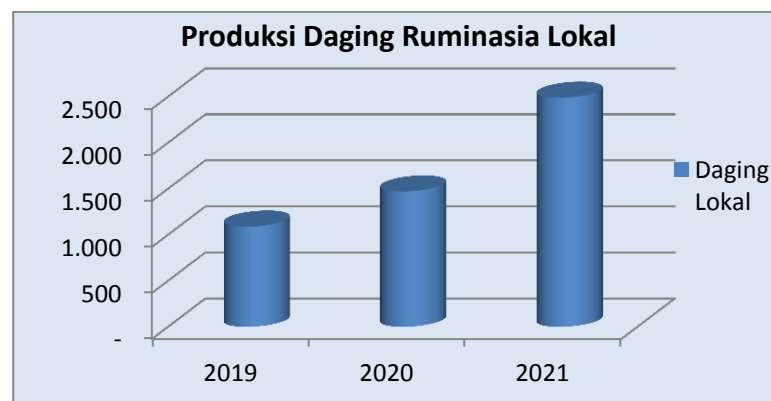
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020

Realisasi tahun 2021 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2019 dan 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal (Ton)	2.253,7 ton	1.089 Ton	48,32%	1.796 Ton	1.470 Ton	81,85%	2.426,2 Ton	2.489 Ton	102,59%
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan (%)	94,5	95,5	101,06%	95,2	94,10	98,84%	95,9%	94,10%	98,12%

Dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa capaian kinerja produksi daging ruminansia lokal tahun 2021 lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2019 dan 2020 . Setiap tahun produksi daging ruminansia lokal mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 52,12%.



Gambar 1. Produksi daging ruminansia lokal

Sedangkan pada sasaran meningkatnya status kesehatan hewan dengan indikator persentase status kesehatan hewan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 94,10% sama dengan tahun 2020 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan status Kesehatan hewan 95,5%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir renstra yakni target sampai dengan tahun 2024. Capaian renstra untuk indikator produksi daging ruminansia lokal dan persentase status Kesehatan hewan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel.3.4.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2021	Capaian tahun 2020 terhadap target akhir renstra
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal (Ton)	3.134,76 ton	2.489 Ton	79,4%
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan (%)	98,0%	94,10%	96,02%

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian renstra untuk indikator produksi daging ruminansia lokal adalah sebesar 79,4% sampai dengan tahun 2021, sedangkan untuk indikator status kesehatan hewan capaian mencapai 96,02%. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau optimis akan dapat mencapai target akhir renstra pada tahun-tahun berikutnya mengingat tahun 2021 merupakan tahun kedua penerapan renstra periode 2019-2024 sehingga masih ada waktu maksimal 3 tahun lagi untuk mencapai target akhir renstra.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1. INDIKATOR ANGKA PRODUKSI DAGING RUMINANSIA LOKAL

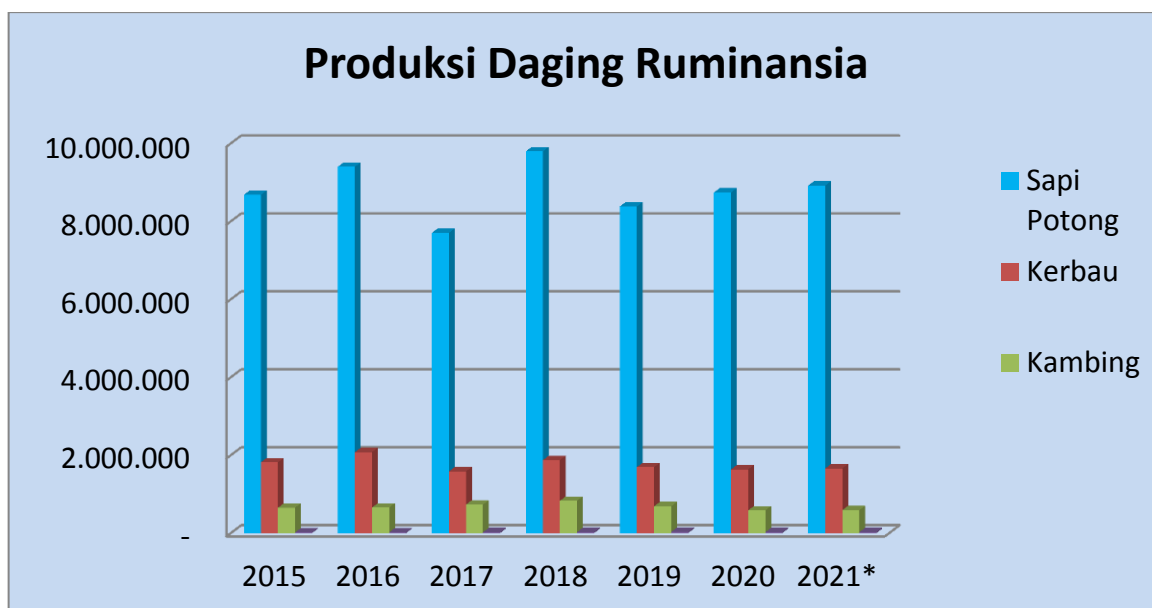
Untuk mengukur Sasaran Strategis I yakni meningkatnya produksi daging digunakan indikator angka Produksi daging ruminansia lokal. Capaian target produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2021 sesuai tabel 3.2 adalah sebesar 102,59%. Capaian kinerja ini sudah sangat bagus karena sudah melebihi target yang ditetapkan di Renstra dan Perjanjian Kinerja. Produksi daging ruminansia lokal yang dihitung adalah daging yang berasal dari pemotongan sapi, kerbau dan kambing yang dibudidayakan di wilayah Provinsi Riau, dan pemotongannya dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan tempat Pemotongan Hewan (TPH) serta tercatat pada iSHIKHNAS.

Pada indikator kinerja angka produksi daging ruminansia lokal yang dihitung hanya dari penghitungan jumlah pemotongan ternak di RPH yang dilaporkan di iSIKHNAS dikalikan dengan berat karkas.

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 produksi daging ruminansia lokal terus mengalami peningkatan dan tahun 2021 target produksi daging ruminansia lokal dapat terpenuhi bahkan melebihi target hingga mencapai 102,59%.

Pada perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, target produksi daging ruminansia dihitung berdasarkan jumlah pemotongan yang dilaporkan oleh Petugas Data di setiap kabupaten/kota. Penghitungan pemotongan ternak tidak hanya pemotongan ternak yang dibudidayakan di Provinsi Riau tapi termasuk juga data pemotongan ternak yang didatangkan dari Luar Provinsi Riau sehingga target produksi daging yang diperjanjikan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jauh lebih besar dibanding target produksi daging yang diperjanjikan dengan Gubernur Riau.

Adapun produksi daging ruminansia secara keseluruhan untuk ternak sapi, kerbau dan kambing dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 3.2. Grafik Produksi daging ruminansia

Tabel.3.5. Produksi daging ruminansia (dari ternak lokal dan dari luar daerah)

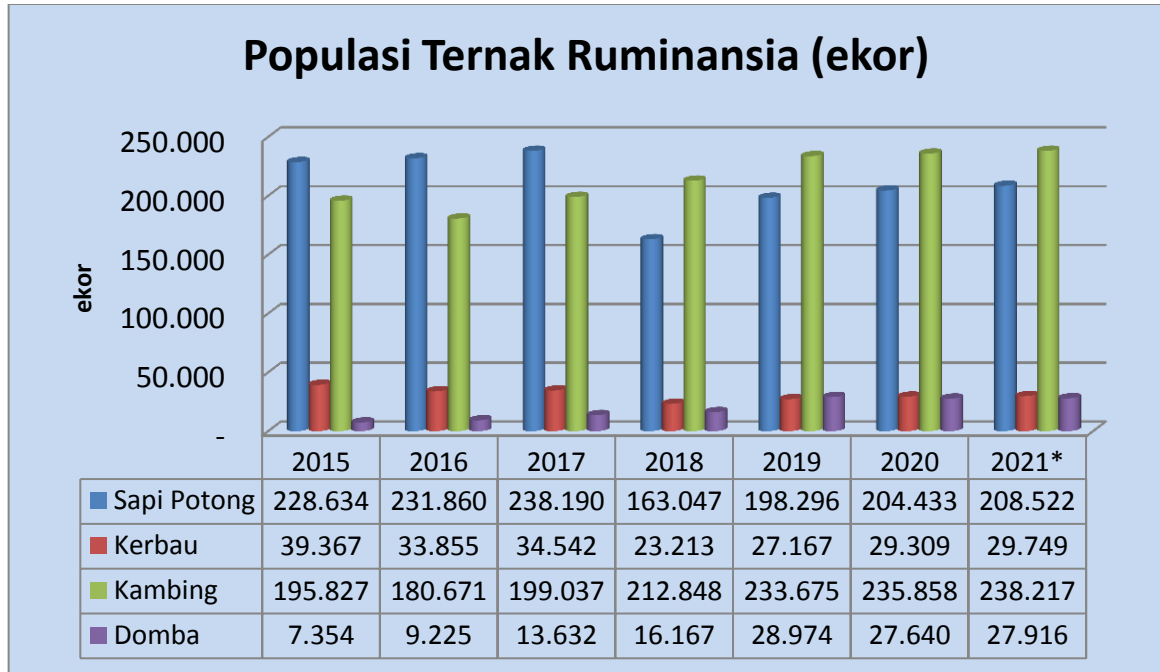
Jenis Ternak	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Sapi Potong	8.676.703	9.396.286	7.700.427	9.792.531	8.379.100	8.737.301	8.912.047
Kerbau	1.813.239	2.074.966	1.579.985	1.868.530	1.689.403	1.631.055	1.655.545
Kambing	648.242	652.278	729.620	826.614	685.156	578.579	584.365
Domba	15.779	15.715	19.084	23.878	27.076	19.879	20.079
JUMLAH	11.155.978	12.141.261	10.031.133	12.513.570	10.782.753	10.968.834	11.172.036

Dari Tabel 3.5. dapat dilihat bahwa produksi daging ruminansia Tahun 2021 di Riau sebanyak 11.172 Ton. Sementara berdasarkan Tabel 3.2. Produksi daging ruminansia lokal sebanyak 2.489 Ton. Jadi dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau baru bisa memenuhi produksi daging ruminansia lokal sekitar 24% dari total produksi daging ruminansia, selebihnya merupakan produksi daging dari pematangan tenak yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat.

Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:



Gambar 3.3. Grafik Populasi Ternak Ruminansia

Dari gambar 3.3. dapat dilihat grafik trend jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Pada populasi Sapi dari tahun 2015-2017 meningkat menjadi 238.190 ekor. Namun pada tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah populasi karena adanya rilis data populasi dari BPS berdasarkan angka Sutas (Survei pertanian antar sensus) yang mana data yang digunakan harus data yang dirilis oleh BPS. Selanjutnya dari data Sutas tahun 2018, Dinas Peternakan melakukan pendataan populasi *by name by address* sehingga data jumlah populasi 2019 dan seterusnya dapat lebih valid lagi. Dari pendataan populasi tahun 2018 hingga 2021 juga terlihat adanya peningkatan jumlah populasi ternak.

Pada tahun 2021 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 22.752 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2021 telah lahir sebanyak 22.859 ekor atau 100,47% dari target. Pelaksanaan IB tergantung dari kesiapan ternak (waktu birahi ternak) dan pelaksanaan IB tidak serentak

sehingga yang sudah di IB sebagian masih bunting dan akan lahir pada tahun 2022.

Tabel 3.6. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi

No	Kabupaten	Target Akseptor IB	Capaian Akseptor IB	Persentase	Target Bunting	Capaian Bunting	Persentase	Target Lahir IB dan KA	Capaian Lahir	Persentase
1	Kuantan Singingi	4.740	5.854	124%	4.171	4.727	113%	3.754	3.690	98%
2	Indragiri Hulu	4.850	6.595	136%	4.268	3.582	84%	3.841	2.902	76%
3	Indragiri Hilir	600	641	107%	528	206	39%	475	283	60%
4	Pelalawan	1.430	1.165	81%	1.500	1.280	85%	1.350	910	67%
5	Siak	2.600	3.189	123%	2.288	2.662	116%	2.059	2.803	136%
6	Kampar	5.481	6.017	110%	4.783	4.929	103%	4.241	6.332	149%
7	Rokan Hulu	5.000	5.782	116%	4.400	4.190	95%	3.985	3.904	98%
8	Rokan Hilir	1.000	1.247	125%	678	534	79%	716	327	46%
9	Bengkalis	2.000	2.013	101%	1.760	1.032	59%	1.516	941	62%
10	Kep. Meranti	175	134	77%	154	97	63%	158	56	35%
11	Pekanbaru	90	44	49%	50	5	10%	47	10	21%
12	Dumai	795	1.107	139%	700	696	99%	610	701	115%
TOTAL		28.761	33.788	117%	25.280	23.940	95%	22.752	22.859	100%

Sumber Data : iSIKHNAS 2021, data diolah

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa target akseptor IB sebanyak 28.761 ekor. Dari target 28.761 ekor yang akan di IB, terealisasi IB nya sebanyak 33.788 ekor sapi melebihi target yang sudah ditetapkan. Dan dari 33.788 ekor sapi yang di IB pada tahun 2021 yang telah berhasil bunting selama tahun 2021 sebanyak 23.940 ekor. Selama tahun 2021 ditargetkan akan lahir 22.752 ekor yang merupakan hasil dari Inseminasi Buatan dan Kawin alam. Target kelahiran ini merupakan terget dari sebgaaian hasil IB tahun 2020 dan sebagian hasil IB tahun 2021. Hal ni karena sapi mempunyai masa bunting selama 9 bulan, jadi bukan berarti bahwa sapi yang lahir tahun 2021 merupakan hasil IB tahun 2021 saja melainkan juga hasil dari IB tahun 2020. Dari 22.859 ekor yang ditargetkan akan lahir, sampai dengan akhir Desember 2020 terealisasi sebanyak 22.859 ekor, selebihnya ternak yang saat ini bunting diperkirakan akan melahirkan pada tahun 2022.

Dalam upaya peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung dari anggaran APBD Riau dan dari APBN dalam bentuk *sharing budget* untuk pembelian semen beku,

Fasilitas alat dan bahan IB, Pengadaan N2 Cair, Operasioanal N2 Cair, Operasional IB, Operasional Pemeriksaan Kebuntingan, Operasional Kelahiran, Pembelian hormon dan vitamin, dan belanja jasa kegiatan lainnya.

Selain dampak terhadap investasi, pelaksanaan IB juga memberikan dampak lain seperti: peningkatan lapangan kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam usaha peternakan sapi dengan adanya insentif pelayanan.

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan populasi melalui IB diantaranya jangkauan pelayanan yang sangat luas dengan jarak tempuh yang jauh bagi Petugas IB untuk dapat mendatangi ternak yang akan di IB. Kendala lainnya yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan peternak dalam mengenal tanda-tanda birahi pada ternaknya dan tidak jarang peternak terlambat mengetahui ternaknya yang dalam keadaan birahi sehingga sewaktu memanggil Petugas IB dan Petugas IB telah datang, ternak yang akan di IB sudah tidak dalam keadaan birahi sehingga IB tidak dapat dilakukan.

Keberhasilan kebuntingan baik yang dari inseminasi buatan maupun kawin alam tidak terlepas juga dari pemenuhan pakan ternak yang berkualitas. Kebanyakan ternak dipelihara dengan pemberian pakan yang seadanya tanpa memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak untuk dapat bunting dan melahirkan. Hal ini terkait juga dengan pengetahuan peternak yang masih minim tentang pakan ternak yang berkualitas dan keterbatasan modal peternak untuk membeli pakan ternak yang berkualitas.

Dalam mengukur kinerja program dan kegiatan yang berkaitan dalam pencapaian peningkatan produksi daging, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah menggunakan aplikasi iSHIKHNAS yang datanya realtime dilaporkan oleh Petugas Lapangan. Berbagai data dari hasil pelaporan Petugas Lapangan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan yang mendukung kebijakan dan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan adanya aplikasi iSHIKHNAS, data jumlah ternak yang di IB, data ternak yang bunting, data jumlah populasi, data pematangan ternak yang berkaitan langsung dengan produksi daging serta data lainnya yang berkaitan dengan peternakan

dan Kesehatan hewan yang dilaporkan oleh Petugas, dapat di akses kapan saja dan data terupdate setiap saat.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dimana Petugas Lapangan yang seharusnya melaporkan dan mengupdate data setiap selesai pelayanan kadang tidak melakukan update data secara disiplin sehingga realisasi capaian yang diaporkan lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan.

Dalam menghadapi kendala peningkatan populasi ternak untuk meningkatkan produksi daging, solusi yang telah dilakukan diantaranya adalah :

- Untuk mengatasi luasnya jangkauan pelayanan IB oleh Petugas, maka dilakukan sentralisasi atau intensifikasi IB melalui zonasi sentra pengembangan ternak.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petugas IB, Petugas PKB dalam memberikan pelayanan IB, PKB dan penanganan gangguan reproduksi ternak
- Melakukan sinkronisasi IB, dimana ternak-ternak sapi dikumpulkan pada suatu tempat dan dilakukan IB secara serentak
- Memberi pembinaan terhadap kelompok untuk penerapan prinsip-prinsip sistem perbibitan ternak
- Memberikan pembinaan dan pemantauan kepada peternak/kelompok akan penting pakan dalam usaha budidaya ternak.
- Penambahan petugas teknis peternakan sehingga petugas dapat membina kelompok secara maksimal
- Peningkatan biaya operasional pelaporan Petugas sehingga petugas pelaksana pelapor termotifasi untuk melaporkan data secara realtime melalui iSHIKHNAS.

Permasalahan lain yang menyebabkan lambatnya peningkatan produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau adalah dikarenakan :

- Adanya pemasukan daging beku dari luar provinsi ataupun dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah dibanding daging sapi lokal menyebabkan melemahnya keinginan peternak lokal maupun RPH menjual dan memotong ternaknya sehingga berpengaruh juga pada jumlah produksi daging lokal.

- Usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi daging ruminansia lokal serta mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang diarahkan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan hewan serta melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan.
- Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan, melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan serta sinkronisasi IB.
- Memberikan bantuan pakan ternak, dan atau fasilitasi pelatihan bagaimana menyediakan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
- Mengembangkan sistem integrasi ternak tanaman terutama ternak sapi dan sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani berupa upaya

peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan lokal dan pemanfaatan limbah ternak dalam bentuk padat dan cair.

- Pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis peternakan
- Peningkatan peran swasta dalam pengembangan sapi potong di lahan perusahaan perkebunan sawit melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk meningkatkan populasi sapi potong sehingga ketersediaan daging sapi lokal di Riau dapat terpenuhi

3.1.4.2. INDIKATOR PERSENTASE STATUS KESEHATAN HEWAN

Indikator persentase status kesehatan hewan digunakan untuk mengukur kinerja sasaran strategis dinas yang II yakni sasaran meningkatnya status kesehatan hewan. Dari Tabel 3.2. dapat diketahui pada capaian Indikator Kinerja Utama yang II yakni Persentase Status Kesehatan hewan tahun 2021 adalah sebesar 94,10% dengan capaian kinerja sebesar 98,12%. Capaian ini menunjukkan hasil penilaian pada kategori sangat tinggi. Capaian diukur dengan menghitung jumlah populasi dikurangi jumlah hewan yang sakit dibagi dengan jumlah populasi dikali 100%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan persentase status kesehatan hewan diantaranya adalah dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengamatan penyakit hewan, pemenuhan sarana prasarana kelembagaan (Puskesmas) dan SDM Kesehatan Hewan dan pengawasan obat hewan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog Cholera, Helminthiasis dan parasit darah. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi.

Pelayanan kesehatan hewan di lapangan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang merupakan pelayanan kesehatan hewan terpadu pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh tenaga medis, para medis, petugas lapangan atau kecamatan yang sekaligus menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. Sasaran pelayanan kesehatan hewan terpadu antara lain ternak sebagai objek pelayanan dengan lebih diutamakan pada ternak-ternak milik petani yang tergabung dalam kelompok petani ternak di wilayah inseminasi buatan serta masyarakat penerima paket-paket bantuan ternak pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pengetahuan mengenai kegiatan surveilans kesehatan hewan sangat penting untuk petugas kesehatan hewan disemua tingkatan guna menentukan langkah pengambilan kebijakan dalam pencegahan, pengendalian dan atau pemberantasan penyakit hewan. Dengan adanya iSIKHNAS petugas kesehatan hewan disemua tingkatan menjadi lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memudahkan dalam pelaporan serta pengambilan kebijakan. ISIKHNAS merupakan sistem pelayanan informasi dan pelaporan terpadu bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan produksi peternakan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan iSIKHNAS petugas dapat melaporkan secara realtime, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui situasi penyakit yang ada di lapangan secara cepat. Selain pelaporan penyakit hewan, iSIKHNAS juga memfasilitasi pelaporan pemotongan, IB, Produksi, dan perbibitan.

Tabel. 3.7. Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Indikator	Tahun				Satuan
		2018	2019	2020	2021	
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	26.794	49.296	35.366	45.722	Ekor
2	Vaksinasi					
	a. Jembrana	59,618	47,909	22,180	23.251	Dosis
	b. Rabies	43,144	40,385	36,858	19.173	Dosis
	c. SE	5,313	4,848	3,488	98	Dosis
3	Penanggulangan Gangrep	3,724	3,811	2,026	2048	Kasus
4	Pemeriksaan Laboratorium	76,556	75,486	112,634	114.545	Sampel
5	Status Kesehatan Hewan	89	95,5	94,1	94,1	%

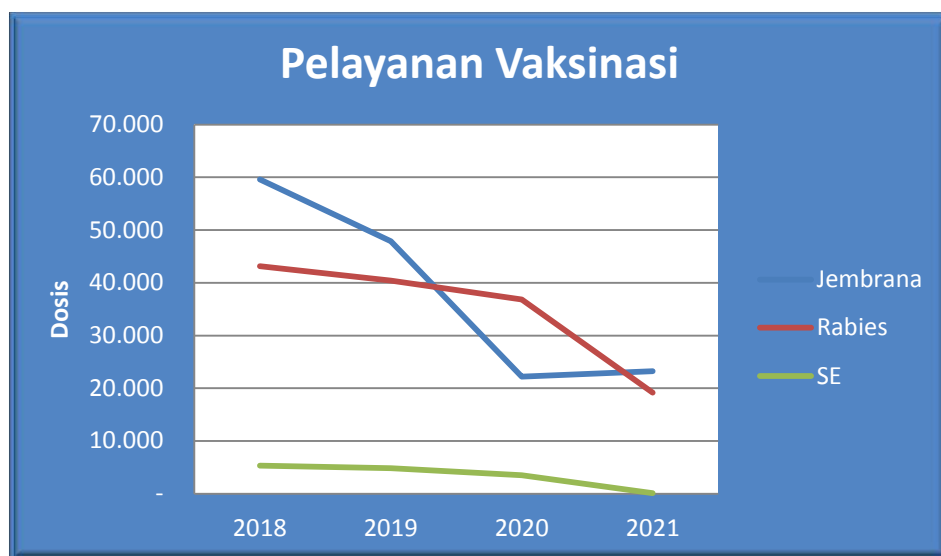
Sumber data : iSIKHNAS 2021

Dari tabel.3.7 dapat dilihat bahwa tahun 2021 dalam rangka peningkatan persentase status kesehatan hewan berdasarkan laporan yang masuk ke sistem pelaporan iSIKHNAS pelayanan kesehatan telah ditangani sebanyak 45.722 ekor. Pelaksanaan Vaksinasi terhadap sejumlah penyakit antara lain penyakit Jembrana, Rabies, dan Septicemia Epizooticae telah dilakukan dengan rincian 23.251 dosis vaksin Jembrana pada Sapi Bali, 19.173 dosis vaksin Rabies pada hewan penular Rabies (anjing, kucing nera) , dan 98 dosis SE pada sapi dan kerbau.

Penanggulangan gangguan reproduksi yaitu kegiatan yang bertujuan menanggulangi gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau agar ternak dapat bereproduksi kembali. Selama 4 tahun terakhir telah ditangani sebanyak 11.609 kasus gangguan reproduksi dan khususn tahun 2021 telah dilaksanakan penanggulangan gangguan reproduksi sebanyak 2.048 kasus.

Pemeriksaan laboratorium adalah kegiatan dalam rangka peneguhan diagnosa dan surveilans penyakit hewan. Tahun 2021 telah dilaksanakan pengujian sampel sebanyak 114.545 sampel di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner.

Rincian pelaksanaan dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.4. Grafik Vaksinasi Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2018-2021

Dari gambar 3.4 dapat dilihat jumlah vaksinasi yang dilakukan terhadap hewan per tahun mulai tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 pelaksanaan vaksin lebih banyak dilakukan dikarenakan pada tahun tersebut kasus penyakit

jembrana masih banyak sehingga perlu dilakukan vaksinasi yang lebih intens untuk mencegah meledaknya kasus penyakit jembrana seperti pada tahun 2016-2017.

Bila dicermati secara keseluruhan, upaya meningkatkan status kesehatan hewan empat tahun terakhir menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target adalah :

- a. Posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai lancar sehingga Provinsi Riau merupakan daerah yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik.
- b. Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
- c. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.
- d. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota sehingga Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya, hal ini terkait dengan minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area cek point pada masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area cek point, tidak dapat difungsikan secara optimal.
- e. Masih kurangnya jumlah petugas puskesmas di kabupaten/kota, sehingga diperlukan adanya penambahan Tenaga medis maupun paramedis dari pusat di kabupaten/kota.
- f. Mengingat terjadinya penularan rabies pada daerah yang bebas, hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan pada pintu masuk (cek point) juga karena banyaknya peluang kemungkinan masuknya ternak atau hewan melalui pelabuhan yang tidak resmi.

Alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan petugas PPV di lapangan melalui SMS Gateway dan iSIKHNAS, sehingga informasi penyakit dapat diketahui dengan cepat, seperti Rabies, AI dan SE yang berkaitan dengan kondisi kurang mendukung seperti banjir dan serta cuaca ekstrem dengan penyampaian pelaporan penyakit dikirimkan dengan tepat waktu atau realtime.
- b. Dalam upaya memenuhi jumlah dan kualitas petugas, diupayakan merekrut tenaga harian lepas baik dari pusat dan daerah serta melatih petugas yang ada dalam bidang teknis keswan
- c. Keterbatasan SDM diupayakan melalui penerimaan tenaga medis dan non medis yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
- d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dilapangan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan, magang, pertemuan teknis dibidang kesehatan hewan.
- e. Dalam penyediaan sarana prasarana dibidang keswan, maka diharapkan kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota, disamping sharing melalui anggaran APBD Provinsi dan APBN pusat, untuk itu perlu koordinasi dan informasi yang baik sehingga kegiatan pelayanan keswan dapat berjalan dengan baik.
- f. Dalam upaya mempertahankan atau mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.
- h. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hewan melalui puskesmas, maka diupayakan peningkatan sarana puskesmas, SDM

(medis, paramedis, Vaksinator, ATR), obat-obatan, kendaraan operasional yang diupayakan melalui anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN Pusat.

- i. Merintis pembebasan bagi daerah-daerah yang berpotensi untuk dibebaskan penyakit secara bertahap serta melakukan kajian analisa resiko terhadap daerah yang dibebaskan.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel.3.8. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansi a lokal	2.426,2 Ton	2.489 Ton	102,59 %	9.901.002.830	8.518.769.288	86,04%
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan	95,9%	94,10%	98,95%	3.693.909.786	3.311.217.348	89,64%

Dari Tabel 3.8. dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging, capaian kinerjanya melebihi target sampai 102,59% dan penyerapan anggarannya dapat ditekan kurang dari 100% dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien. Sedangkan pada sasaran strategis meningkatnya status kesehatan hewan, capaian Kinerjanya tidak tercapai 100% dengan penggunaan anggaran 89,64% sehingga belum bisa dikatakan efisien karena target kinerjanya tidak tercapai. Analisis efisiensi dilakukan bila capaian kinerja mencapai target yang telah ditentukan dengan penggunaan anggaran kurang dari anggaran yang tersedia.

Pada Tahun 2021, analisis efisiensi dapat dilakukan pada sasaran meningkatnya produksi daging ruminansi lokal dengan indikator angka produksi ruminansi lokal dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.9. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal	102,59%	86,04%	16,55 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran cukup baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja produksi daging ruminansia lokal sebesar 102,59% dapat tercapai dengan serapan anggaran sebesar 86,04% dengan tingkat efisiensi mencapai 16,55%.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Produksi Daging Ruminansia Lokal

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja yakni pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging dengan Indikator Kinerja Angka produksi daging ruminansia lokal pencapaiannya ditunjang dari Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Dengan adanya Kepmendagri 050-3708, maka Program Kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada di Kepmendagri tersebut. Sehingga Program Peningkatan Hasil Produksi Hasil Peternakan dipetakan menjadi 3 Program yakni Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian yang indikatornya Jumlah Populasi Ternak. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termasuk turut mendukung pencapaian peningkatan produksi daging adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
												Rp	%
1	Meningkatnya Produksi Daging Ruminansia Lokal	Angka Produksi Daging Ruminansia Lokal	2.426,2 Ton	2.489 Ton	102,59 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)	519.341	504.403	97,12	6.132.504.288	5.164.499.196	84,22
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Ternak yang Ber SKLB (Ekor)	150	48	32,00	179.460.000	127.574.850	71,09
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Ternak yang Ber SKLB	55	48	87,27	179.460.000	127.574.850	71,09
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelahiran Ternak (Ekor)	22.752	22.859	100	533.489.715	469.517.045	88,01
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit Pengolahan Pakan (Unit)	7	7	100,00	533.489.715	469.517.045	88,01
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Akseptor (Ekor)	49.500	38.802	78,39	2.029.799.878	1.911.983.385	94,20
						Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Ternak yang Di Inseminasi Buatan (IB) (Ekor)	27.500	34.603	125,83	475.942.065	441.233.650	92,71
						Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Ton)	120	120	100,00	890.782.791	829.795.360	93,15
					Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah produksi semen beku (Dosis)	24.000	50.707	211,28	663.075.022,00	640.954.375	96,66	

						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Ternak Sapi yang Didistribusikan (Ekor)	2.030	-	-	3.389.754.695,00	2.655.423.916	78,34
						Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Ternak Sapi yang Didistribusikan (Ekor)	2.030,00	-	-	3.389.754.695,00	2.655.423.916	78,34
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)	519.341	504.403	97,12	1.739.319.677,00	1.340.209.227	77,05
						Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kawasan yang dikembangkan	7	7	100,00	1.739.319.677,00	1.340.209.227	77,05
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Kawasan yang dikembangkan	7	7	100,00	326.213.172,00	128.343.900	39,34
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana produksi inseminasi buatan ternak (Unit)	2	2	100,00	839.411.600,00	738.670.672,90	88,00
							Jumlah Sarana Prasarana UPT. Laboratorium Pakan Ternak (Unit)	2	2	100,00	573.694.905,00	473.194.654,66	82,48
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)	519.341	504.403	97,12	2.029.178.865,00	2.014.060.865	99,25
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok yang Menerapkan GFP (Kelompok)	60	-	-	2.029.178.865,00	2.014.060.865	99,25
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan (OB)	847	770	90,91	2.029.178.865,00	2.014.060.865	99,25

Dari Tabel 3.10. terlihat bahwa untuk meningkatkan produksi daging ruminansia lokal maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang dipetakan sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 menjadi Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian. Ketiga program ini menggunakan indikator jumlah populasi ternak dikarenakan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 belum berubah sementara di DPA sudah harus menggunakan nama Program Kegiatan yang baru sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.

Outcome yang diharapkan dari ketiga program ini adalah peningkatan jumlah populasi ternak yang secara langsung akan meningkatkan produksi daging. Penambahan populasi ternak dapat dilakukan melalui penambahan kelahiran baik yang berasal dari Inseminasi Buatan ataupun yang berasal dari kawin alam. Pada tahun 2021 terjadi penambahan kelahiran sapi sebanyak 22.859 ekor baik yang berasal dari Inseminasi Buatan maupun dari kawin Alam sebagai outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tahun 2021 capaian sasaran strategis angka produksi daging sudah mencapai target bahkan melebihi target mencapai 102,59%. Produksi daging ruminansia lokal dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 52,12%. Sub Kegiatan yang menunjang peningkatan produksi daging pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem

Manajemen Mutu SDG Hewan dengan capaian kinerja 87,27%, Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja 100%, Pengawasan Peredaran dan

Pelaksanaan IB pada ternak



Anak sapi hasil Inseminasi Buatan (IB)

Sertifikasi Benih/Bibit Ternak dengan capaian 125,86%, Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan capaian kinerja 100%, Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (UPT. IBT) dengan capaian kinerja 212,28%. Sedangkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian seluruh Sub Keegiatannya mencapai target 100%, terdiri dari sub kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan capaian kinerja 100% dan sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya dengan capaian 100%.

Dengan capaian kinerja yang tinggi dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada ketiga program tersebut memberi pengaruh yang besar pada outcome peningkatan populasi dan produksi daging.



Gambar 3.5. Penyerahan bantuan alat pengolah pakan ke Kab/Kota

Pada sasaran strategis Meningkatnya status Kesehatan hewan dengan indikator persentase status Kesehatan hewan capaian kinerjanya didukung oleh Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.11. Program/Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Status Kesehatan Hewan (Sasaran Strategis Ke-2)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
												Rp	%
1	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Status Kesehatan Hewan	95,20	94,1	98,84%	PROGRAM KESEHATAN Hewan DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pesentase Angka Kematian Ternak (Persen)	3,10	2,10	132	3.693.909.786	3.311.217.348	89,64
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Angka Kesembuhan (Persen)	62,50	85,00	136,00	2.174.330.587	1.934.652.104	88,98
						Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Dilayani (Ekor)	35.000,00	34.659,00	99,03	2.174.330.587	1.934.652.104	88,98
						Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Frekuensi Pengawasan Hewan dan Produk Hewan di Check Poin (Kali)	2.400,00	3.165,00	131,88	485.656.814	429.118.234	88,36
						Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan NKV (Unit Usaha)	18,00	21,00	116,67	80.677.275	59.416.075	73,65
						Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Kasus yang Ditanggulangi (Unit)	5,00	5,00	100,00	404.979.539	369.702.159	91,29
						Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Unit Usaha)	18,00	21,00	116,67	54.858.510	44.750.510	81,57
						Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan NKV (Unit Usaha)	18,00	30,00	166,67	54.858.510	44.750.510	81,57
						Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pelayanan (Sampel)	70.000,00	118.456,00	169,22	979.063.875	902.696.500	92,20
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelayanan (Sampel)	70.000,00	118.456,00	169,22	979.063.875	902.696.500	92,20

Dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan status Kesehatan hewan, didukung dengan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator angka kematian ternak. Capaian kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sangat tinggi melebihi target dimana angka kematian ternak bisa ditekan menjadi 2.1% dari 3,1% yang ditargetkan dengan capaian kinerja 132%. Angka kematian ternak yang rendah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, hampir seluruh kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada kegiatan realisasinya jauh melebihi target. Hanya satu sub kegiatan yang capaiannya dibawah target yakni pada sub kegiatan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dengan capaian kinerja 99,03%. Namun sebenarnya juga sudah tinggi dan bisa dikatakan mencapai target. Selebihnya kegiatan mencapai target malah terdapat kegiatan yang capaiannya melebihi target yakni sub kegiatan Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan dengan capaian kinerja 116,67%, Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan dengan capaian kinerja 166,67%. Capaian kinerja sub kegiatan yang tinggi memberi pengaruh yang besar untuk capaian kinerja program sehingga capaian kinerja program melebihi target dengan capaian 132%. Dengan capaian kinerja program yang tinggi juga memberi pengaruh pada peningkatan status kesehatan hewan yang merupakan salah satu sasaran strategis dinas.

Disamping ke empat program di atas, sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga didukung oleh anggaran APBN yang terdiri dari tiga program sebagai berikut :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan terdiri dari :
 - Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan.
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
 - Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak.

- Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH.
 - Kegiatan Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
3. Program Dukungan Manajemen, dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.

Semua kegiatan ini memiliki capaian kinerja 100% bahkan lebih.



Gambar 3.6. Pelayanan Medik di UPT LVKH



Gambar 3.7. Pengambilan Sampel Pullorum



Gambar 3.8. Pengambilan Sampel PCR AI



Gambar 3.9. Pelaksanaan Vaksinasi Rabies Gratis dalam rangka *World Rabies Day*

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 alokasi dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.64.671.902.133,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 34.854.688.586,-. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi tahun 2021 memiliki 5 Program dengan 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 34.854.688.586,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 32.604.167.140,56,- (93,54%) dan realisasi fisik 98,66%.

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021

	PROGRAM	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.132.504.288	5.164.499.196	84,22%
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.739.319.677	1.340.209.228	77,05%
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.693.909.786	3.311.217.348	89,64%
4	Program Penyuluhan Pertanian	2.029.178.865	2.014.060.865	99,25%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.259.775.970	20.774.180.504	97,72%
	TOTAL	34.854.688.586,00	32.604.167.140,56	96,54%

Dari Tabel 3.11. dapat dilihat realisasi anggaran per program sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp. 21.259.775.970,- dengan realisasi keuangan Rp. 20.774.180.504,- (97,72%).
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian jumlah pagu Rp. 6.132.504.288,- dengan realisasi Rp 5.164.499.196,- (84,22%).
- c) Program Penyuluhan Pertanian pagu Rp. 2.029.178.865,- dengan realisasi Rp.2.014.060.865,- (99,25%).
- d) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pagu Rp. 1.739.319.677,- dengan realisasi Rp. 1.340.209.227,56,- (77,05%).
- e) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pagu Rp.3.693.909.786,- dengan realisasi Rp.3.311.217.348,- (89,64%) dengan rincian program sebagai berikut :

Disamping dana dari APBD Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memperoleh dana untuk pembangunan peternakan dan kesehatan yang berasal dari dan APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Alokasi anggaran pada perjanjian kinerja awal sebesar Rp. 7.473.898.000,- (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Anggaran setelah refocussing menjadi Rp. 4.510.181.000,- (empat miliar lima ratus sepuluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). Capaian keuangan dari anggaran tersebut sebesar Rp. 4.490.899.144,- (Empat miliar empat ratus Sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) (99,57%).

Tabel.3.13. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2021

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
		Rp	%	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS				
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	17.676.000	17.676.000	100,00	100
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	349.900.0000	347.687.300	99,37	100
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	3.486.309.000	3.472.546.707	99,61	100
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	313.957.000	310.842.637	99,01	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEN				
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	206.915.000	206.824.100	99,96	100
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI				
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	135.424.000	135.322.400	99,92	100
Jumlah	4.510.181.000	4.490.899.144	99,57	100

Capaian fisik anggaran APBN Ditjen PKH sebesar **100%**, sedangkan capaian **keuangan** sebesar sebesar **Rp 4.490.899.144,-** (Empat miliar empat ratus Sembilan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus empat belas rupiah) (99.57%). Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 berdasarkan penilaian pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan menunjukkan **Pencapaian Kinerja** sebesar **91.28%**, dengan rincian **Nilai Realisasi Anggaran 99.55%**, **Nilai Konsistensi RPD Akhir 68.37%**, **Capaian Keluaran Kegiatan 100%** dan **Nilai Efisiensi 89.78%**.

BAB IV

PENUTUP

Bab III berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran Tindak Lanjut

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran strategis, dengan dua indikator kinerja utama diketahui bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya produksi daging ruminansia dengan indikator angka produksi daging ruminansia lokal menunjukkan hasil kinerja yang sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja produksi daging sapi lokal 102,59%, sedangkan pada sasaran strategis meningkatnya status kesehatan hewan dengan indikator kinerja utama persentase status Kesehatan hewan menunjukkan capaian kinerja termasuk pada kategori Sangat Tinggi dengan capaian kinerja 98,95%. Walaupun capaian kinerja sudah tinggi tapi masih harus terus dilakukan peningkatan hingga capaian kinerja 100% atau bahkan lebih dari 100%.
2. Permasalahan utama dalam peningkatan produksi daging adalah kurang dan lambatnya pertumbuhan populasi ternak akibat angka kelahiran ternak yang masih tergolong rendah sebagai akibat belum maksimalnya upaya

peningkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan dan Kawin Alam akibat keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana serta belum diterapkannya GFP oleh peternak akibat keterbatasan pengetahuan dan modal peternak dalam menerapkan GFP.

3. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalul lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.

4.2. Saran Tindak Lanjut

Upaya/saran tindak lanjut yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Untuk mengantisipasi lambatnya laju pertumbuhan populasi khususnya sapi potong maka perlu pembenahan dalam sistem perbibitan. Untuk itu perlu peningkatan kerjasama dengan pihak perkebunan dan agroindustri perkebunan sebagai sumber bahan pakan dan Kawasan pengembangan peternakan yang difasilitasi pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat. Disamping itu perlu juga peningkatan kemampuan SDM peternak dan aparat Pembina, peningkatan peran dan fungsi kelembagaan peternak, serta peningkatan fasilitas penunjang peternakan dalam rangka pengembangan peternakan khususnya dalam penyediaan bibit dan bakalan.
2. Dalam upaya mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. RAHMAT SETIYAWAN
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAMSUAR
Jabatan : Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,



SYAMSUAR



Pekanbaru, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,



drh. RAHMAT SETIYAWAN
Pembina TK.I
NIP. 19700304 199903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal	2.426,20 Ton
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan	95,9 %

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peminjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau	22.836.820.260,00	APBD
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	34.573.993.783,00	APBD
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.215.853.619,00	APBD
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.200.605.883,00	APBD
5	Program Penyuluh Pertanian	1.954.179.115,00	APBD
6	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi	213.000.000,00	APBN
7	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.647.010.000,00	APBN
8	Program Dukungan Manajemen	290.801.000,00	APBN


PIHAK KEDUA
SYAMSUAR

Pekanbaru, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

Jh. RAHMAT SETIAWAN
 Pembina TK.I
 NIP. 197003041999031004



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 12907/Kpts/KP.450/F/10/2021

MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA

Rafli, SH

Sebagai Peringkat 2 Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Kabupaten Komoditas Peternakan

Tingkat Nasional

Jakarta, Oktober 2021

An. MENTERI PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



[Signature]
NUSRULLAH, M.Sc



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada:

AANG KUSBIANTORO
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

sebagai

JUARA III
PETUGAS INSEMINATOR WILAYAH DOMINAN IB

Oktober 2021
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan





TANDA BUKTI PEMBERIAN HADIAH
DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN

Pengirim : Direktorat Kesehatan Hewan
Penerima dana : drh. Adriyan Permana Putra
Instansi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Riau
Penghargaan : Koodinator iSIKHNAS Provinsi Terbaik I
Keterangan : Smartphone

Jakarta, Desember 2021

Penerima Hadiah

drh. Adriyan Permana Putra

TANDA BUKTI PEMBERIAN HADIAH
DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN

Pengirim : Direktorat Kesehatan Hewan
Penerima dana : drh. Fadjar Riyayanti
Instansi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Dumai
Penghargaan : Koordinator iSIKHNAS Kabupaten/Kota Terbaik
III
Keterangan : Smartphone

Jakarta, Desember 2021

Penerima Hadiah

drh. Fadjar Riyayanti

TANDA BUKTI PEMBERIAN HADIAH
DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN

Pengirim : Direktorat Kesehatan Hewan
Penerima dana : drh. Mochlisin
Instansi : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Pelalawan Riau
Penghargaan : Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan Terbaik
Dalam Pelaporan iSIKHNAS Terbaik II
Keterangan : Smartphone

Jakarta, Desember 2021

Penerima Hadiah

drh. Mochlisin